KOALISI: DULU, KINI DAN ESOK

Oleh: Muhsin Hariyanto

Konon, di saat Nabi Miuhammad s,.a.w. menyepakati kerjasama timbal-balik dengan antara umat Islam dan Non-Muslim di (Negara) Madinah, pada saat itulah sebenarnya beliau memberi telah contoh kogkret bagaimana seharusnya berkoalisi dengan siapa pun. Tersedianya sejumlah "anggukan universal" (common platform atau kalimatun sawâ') yang disetujui antarpihak yang berkoalisi untuk dijadikan sebagai agenda bersama untuk membangun kemashlahatan bersama, dan – tentu saja – dengan tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing komunitas yang tak mungkin diabaikan demi (untuk meraih) kepentingan kolektif. Dan Uswah Hasanah dari Nabi kita itu ternyata hingga kini masih relevan untuk kita amalkan dalam kehidupan bersama, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks apa pun. Termasuk di dalamnya dalam konteks politik-kenegaraan kita.

Ironisnya, dalam banyak hal kerjasama antarpihak yang kini lebih marak dilakukan oleh berbagai komunitas, lebih bernuansa politis jangka pendek. Dalam makna kongkret: "demi untuk meraih kue-kue kekuasaan", apa pun bentuknya. Termasuk kekuasaan politik jangka pendek untuk sesuatu yang berujung pada kepentingan (jangka pendek), berupa "perolehan keuntungan-keuntungan finansial".

Semangat Piagam Madinah yang diartikulasikan oleh Nabi s.a.w., mewakili Umat Islam – pada saat itu – dengan semangat kepemimpinan profetik Sang Pemimpiin Sejati (Nabi Muhammad s.a.w.) kini telah berubah menjadi 'semangat kerjasama' oportunistik, demi 'perut' yang perlu diisi, yang pada saatnya lebih berorientasi individual atau kelompok kecil, atau maksimal antarindividu yang berorientasi "*ma'îsyah*" (baca: harta-dunia). Bahkan lebih ironis lagi -- dalam koalisi itu -- simbol-simbol moralitas-keberagamaan diusung dengan kemasan-kemasan tertentu untuk memperkokoh legitimasinya.

Memang naïf. Tetapi itulah realitas kehidupan kita sekarang yang mulai menampakkan tanda-tanda "*al-wahn*" (cinta dunia, dan takut mati), sebuah penyakit sosial yang dikhawatirkan oleh Nabi s.a.w. akan mewabah di kalangan umat Islam, yang pada saatnya akan mengakibatkan umat Islam akan menjadi seperti buih di lautan: "besar dalam arti kuantitatif, tetapi tak pernah diperhitungkan, karena kualitas kekuatan mereka yang memang tidak perlu dipertimbangkan.

Kini wabah itu mulai terlihat tanda-tandanya. Di ketika umat Islam, diwakili oleh partai-partai politik yang merasa mewakili kepentingan umat Islam, membangun berbagai koalisi dengan lebih banyak memosisikan dirinya sebagai para makmum (baca: *loyal*-followers; para pengikut setia) daripada memosisikan dirinya sebagai imam-imam (baca: *leaders*; para pemimpin) yang diprediksi akan

memberikan 'keuntungan' untuk sesuatu yang terlalu mudah untuk diprediksi. Apalagi kalau bukan "kue-kekuasaan".

Padahal, Islam telah menuntunkan sebuah pola kerjasama timbal-balik yang terbangun dengan semangat "ta'âwun 'alâ al-birr wa at-taqwâ" (berkoalisi dalam kebajikan dan takwa), dan bukan " ta'âwun 'alâ al-itsm w al-'udwân" (berkoalisi dalam berbuat dosa dan pelanggaran)" (QS al-Maidah [5]: 2). Bekerjasama dalam membangun kebaikan dan kemaslahatan merupakan esensi koalisi Islami. Koalisi kebaikan, selain perlu dibangun demi terwujudnya kesejahteraan, keamanan, dan kesentosaan, juga dipandang penting untuk meredam gejolak kejahatan serta maraknya perbuatan dosa dan maksiat. Itulah etos-koalisi yang digagas oleh al-Quran.

Di antara upaya yang bisa dilakukan oleh koalisi kebaikan adalah dengan mengonstitusikan kebenaran dalam kerangka dan aturan yang jelas, visioner dan bermartabat. Bukan koalisi 'cek kosong" yang tak berujung pangkal, kecuali janji-janji perolehan kursi kekuasaan.

Konsep *ta'awun* (koalisi) dalam Islam tidak mempersyaratkan kesamaan status, termasuk status keberagamaan. Dan sama sekali tak dibatasi oleh sekat-sekat kepentingan, kecuali kepentingan untuk menggapai kemashlahatan dengan cara yang elegan antarkomunitas yang beragam. Koalisi yang dibangun atas asas kebersamaan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran universal.

Koalisi juga tidak seharusnya mengedepankan kepentingan politis jangka pendek yang sarat tipu-daya, yang pada saatnya justeru akan menjebak mereka (yang berkoalisi) dalam jebakan kepentingan ideologi-sempit. Karena, disadari atau tidak, kepentingan ideologi-sempit akan menciptakan 'koalisi penuh kecurigaan', yang esensinya bukan koalisi sesungguhnya, tetapi hanya sebuah koalisi yang penuh dengan kepura-puraan, yang justeru akan menjadi bom-waktu yang akan meledek dan berpotensi untuk mencederai semua piihak yang berkoalisi pada saat tertentu..

Perbincangan di seputar koalisi, kini – di saat menjelang 'pilpres' – kian menjadi diskusi yang masih menarik, dan ditengarai akan selalu menarik perhatian setiap anggota masyarakat, karena artipentingnya pranata sosial ini sebagai pilar penyangga bangunan harmoni sosial kita, di tengah kegalauan dan kerinduan rakyat Indonesia, tidak terkecuali umat Islam.

Sebuah koalisi yang mereka dambakan adalah sebentuk koalisi yang di dalamnya dibangun semangat kepedulian, rasa sepenanggungan, kasih sayang, kebersamaan dan ketulusan. Karena sejumlah tantangan kompleks yang akan selalu muncul, termasuk potensi konflik yang ditimbulkan oleh dorongan ego kita (di Negara Indonesia tercinta), pada saatnya bisa menjebak segenap anak bangsa menjadi manusia-manusia yang tidak peduli terhadap kepentingan orang

lain, karena menganggap yang terpenting adalah dirinya. Orang lain baru dianggap (menjadi) penting karena berpotensi "menguntungkan" bagi dirinya.

Oleh karena itu, untuk membangun koalisi ideal, setiap peserta koalisi, dituntut untuk memiliki kepedulian dan ketenggangrasaan terhadap pihak lain, dan bahkan bisa menganggap pihak lain sebagai entitas yang penting, sepenting dirinya.

Dalam merespon wacana koalisi tersebut, kita (umat Islam) bisa mengajak dialog dengan al-Quran, sebagaimana nasihat Ali bin Abi Thalib terhadap para sahabatnya: *istanthiq al-Quran*, yang ternyata menurut M. Quraish Shihab tersirat dalam gagasan "*ukhuwwah*".

Koalisi ke depan sudah semestinya merujuk pada gagasan besar (*ukhuwwah*) ini, yang pada saatnya perlu di"objektivikasi" (meminjam istilah Kuntowijoyo) menjadi sesuatu gagasan yang bisa diterima oleh semua pihak, dan – yang lebih utama – bisa dilaksanakan.

Dari. *ukhuwwah* yang digagas oleh al-Quran itulah Nabi s.a.w. menerjemahkannya ke dalam bentuk koalisi jangka panjang dengan antara umat Islam dengan komunitas non-muslim, yang ternyata menghasilkan kerjasama (*ta'âwun*) yang bisa dinikmati oleh semua pihak yang berkoalisi, tanpa mencederai kepentingan pihak mana pun.

Berkaca dari keberhasilan Nabi s.a.w. yang merepresentasikan kepentingan umat Islam dalam merajut *ukhuwwah Islâmiyyah*, yang dimaknai lebih daripada sekadar mempersaudarakan antarorang Islam, tetapi lebih dari itu: "mempersaudaran seluruh umat manusia dengan mengedepankan nilai-nilai Islam, Nabi Muhammad s.a.w. berhasil memberikan *uswah hasanah*, bagaimana seharusnya berkoalisi untuk kepetingan kolektif manusia. Mencari titik-temu (anggukan-universal) antarkepentingan umat manusia, dan mengeliminasi – untuk sementara – titik-potong (gelengan-universal) yang seringkali menghambat upaya kerjasama antarumat manusia untuk membangun sinergi-strategis untuk kemashlahatan umat manusia, tidak terkecuali: "kepentingan bangsa dan Negara Indonesia tercinta".

Dengan terus memperbarui niat kita untuk berkoalisi bersih, dengan semangat *ukhuwwah Islamiyah* dalam pengertian luas, *insyâallah* etos-koalisi yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah melalui panduan Piagam Madinah, bisa terbangun kembali dalam koalisi-koalisi kita ke depan.

Penulis adalah Dosen Tetap FAI-UMY dan Dosen Luar Biasa STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta.